

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN KAWASAN TELUK TOMINI DI KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

Putri Diah Rahayu¹, Rusli Isa², Rostam Tohopi³

Universitas Negeri Gorontalo

putridiahrahayu130301@gmail.com; [rusli isa@ung.ac.id](mailto:rusli_isa@ung.ac.id);

rustamtohopi@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis di lapangan bahwa (1) Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, berdasarkan temuan di lapangan ditemui beberapa kendala yang disampaikan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni kesulitan mencari bahan bangunan dikarenakan banyak antrian pembeli, juga mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan sudah dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Permukiman Kumuh, Pembangunan Kawasan Teluk Tomini

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Implementation of Slum Handling Policy (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting the Development of the Tomini Bay Area in Dumbo Raya District by using planning, implementation and reporting indicators. (2) Factors Determining the Success of Implementation of Slum Handling Policy (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting the Development of the Tomini Bay Area in Dumbo Raya District by using organizational indicators, interpretation, and implementation. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type, while the data collection techniques used are observation,

interviews and documentation. Based on the results of research analyzed in the field that (1) Implementation of Slum Handling Policy (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting the Development of the Tomini Bay Area in Dumbo Raya District using planning, implementation and reporting indicators has been carried out properly. However, based on findings in the field, several obstacles were encountered by Recipients of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS), namely difficulty finding building materials due to many queues of buyers, also complaining that the building materials ordered were not sufficient for the construction of their houses, so KPB overcame the shortage using his personal money. (2) Factors that determine the success of the implementation of Slum Handling Policy (Self-help Housing Stimulant Assistance) in supporting the development of the Tomini Bay area in Dumbo Raya District using organizational indicators, interpretation and implementation that have been carried out properly.

Keywords: Policy Implementation, Management Of Slums, The Development Of The Teluk Tomini

PENDAHULUAN

Kondisi topografi Kota Gorontalo berupa tanah datar yang dilalui 3 sungai yang bermuara di Teluk Tomini. Kota Gorontalo diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada upaya mendorong pertumbuhan produksi pertanian, pusat pengolahan ikan tangkap, dan wisata bahari yang memanfaatkan potensi Teluk Tomini. Teluk Tomini dengan keindahannya sangat menarik untuk dipandang mata. Potensi luar biasa yang dimiliki teluk tomini dikembangkan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya.

Kecamatan Dumbo Raya merupakan salah satu kecamatan di Kota Gorontalo dan juga merupakan kawasan pesisir yang memiliki karakteristik lingkungan yang dinamis. Kecamatan Dumbo Raya dengan banyak potensi yang dimiliki sebagai kawasan pesisir nyatanya juga menjadi wilayah dengan perumahan yang padat dan permukiman yang kumuh. Kecamatan Dumbo Raya termasuk dalam daftar penetapan kawasan kumuh sesuai dengan SK Walikota Gorontalo Nomor 341/23/XII/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Gorontalo.

Permukiman di kecamatan Dumbo Raya termasuk dalam kategori permukiman kumuh, permasalahan-permasalahan yang muncul di lokasi yaitu diantaranya, tidak teraturnya tata letak bangunan, tingkat kepadatan tinggi, minimnya pasokan air bersih, tidak adanya sistem drainase, rumah tinggal yang tidak memiliki jamban, tidak tersedianya ruang terbuka publik dan tidak terangkutnya sampah yang berpotensi menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Dengan segala kriteria yang menjadi latar belakang beberapa kelurahan di kecamatan Dumbo Raya masuk dalam daftar wilayah dengan permukiman yang kumuh. Maka penting bagi peneliti untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani permasalahan diatas.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dijelaskan dalam PERDA Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2017 tentang tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk: (1) Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; (2) Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Berdasarkan kewajiban pemerintah dalam penanganan serta pencegahan perumahan dan permukiman kumuh, terdapat satu program yang digagas oleh pemerintah terkait penanganan permasalahan tersebut yakni pemberian program BSPS. Program tersebut melalui Pasal (1), Permen PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program BSPS merupakan akomodasi pemerintah dalam bentuk bantuan intensif pembangunan/perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang daya belinya terbatas, sehingga membutuhkan bantuan negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pembangunan Baru (PB) atau Perbaikan Total (PT) adalah kegiatan membangun rumah layak huni di atas tanah yang sudah matang. Peningkatan Kualitas (PK) merupakan kegiatan memperbaiki komponen rumah guna memenuhi syarat rumah layak huni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan) Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Oleh karena itu studi ini menjadi penting untuk dilakukan, untuk menganalisis kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Dumbo Raya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian sebagai gagasan awal skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam

Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang penelitian yang diteliti. Meleong (dalam Hanapi 2017:45) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Responden yang akan diwawancarai yaitu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas PERKIM Kota Gorontalo, Kepala Seksi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PERKIM Kota Gorontalo, Camat Dumbo Raya Kota Gorontalo, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Talumolo, dan Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Gorontalo, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kelurahan Talumolo. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini yang menjadi fokus dan sub fokus adalah (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dan (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Berikut deskripsi hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan terhadap fokus dan sub fokus penelitian tersebut.

Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS))

Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Gorontalo berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat 3 indikator yang dipilih peneliti dalam proses implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan: sosialisasi dan/atau penyuluhan; verifikasi calon penerima BSPS; kesepakatan calon Penerima BSPS; identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. Berikut hasil wawancara dari sebagian informan di lapangan berkenaan dengan hal tersebut.

Sosialisasi merupakan tahapan pertama dalam proses perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuan dari adanya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan pemahaman konsep BSPS. Sosialisasi dilakukan sebelum dan selama kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program BSPS. Cara sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik situasi dan kondisi masyarakat setempat, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung. Tahapan setelah dilaksanakannya sosialisasi, selanjutnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) akan melakukan verifikasi calon penerima BSPS, verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan. Tahapan selanjutnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni adanya kesepakatan calon penerima. Kesepakatan tersebut dapat dilihat melalui kesiapan Calon Penerima Bantuan (CPB) dalam berswadaya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan Uraian diatas dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun pada tahapan penyusunan proposal terlihat Calon Penerima Bantuan (CPB) kurang memahami dalam penyusunan proposal sehingga Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) harus bolak-balik ke rumah CPB untuk melakukan pendampingan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. Berikut beberapa hasil wawancara dari beberapa informan di lapangan terkait hal tersebut.

Berdasarkan proposal yang telah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Koordinator Kota (Korkot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), selanjutnya TFL program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melakukan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan sehingga pelaksanaan pembangunan rumah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sesuai dengan yang direncanakan. Tahapan selanjutnya saat memasuki tahap pelaksanaan konstruksi, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mendampingi penerima bantuan dan tukang bangunan dalam proses pembangunan rumah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada saat melaksanakan pendampingan, TFL sudah dibekali pemahaman cara membangun rumah sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis penyusunan laporan pelaporan kegiatan BSPS. Dalam kegiatan BSPS, penerima manfaat merupakan aktor kunci yang terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Penerima Bantuan atau Kelompok Penerima Bantuan (KPB) mengawasi pembangunan rumah mereka untuk secara berkala memenuhi kebutuhan perumahan yang direncanakan yang memadai melalui dokumentasi dan dengan melengkapi Kartu Konstruksi Mandiri (K3M). Selain melengkapi K3M, penerima yang didampingi TFL juga menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) secara bertahap sesuai dengan tahapan pemanfaatan dana (ada 2 tahapan). Setelah progres fisik mencapai paling rendah 30%, paling tinggi 100%, penerima bantuan didampingi oleh TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 untuk progres 30% dan tahap 2 untuk progres 100%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa proses implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Dumbo Raya sudah sesuai dengan prosedur pelaporan yang diterapkan berdasarkan pedoman dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun, berdasarkan temuan di lapangan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) kesulitan dalam melakukan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sehingga yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL.

Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan. Ada tiga variable menurut Charles O. Jones (1984: 178), ia menyatakan bahwa ada beberapa variable atau yang sering disebut faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yakni: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Sudah sejauh mana Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dapat ditinjau dari variable-variabel yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara bersama para informan. Serupa dengan penelitian terdahulu oleh Sri Intan Liputo (2021) “melihat faktor-faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.”

Organisai (*Organization*)

Organisasi menurut Jones (1996: 296), dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Gorontalo khususnya Kecamatan Dumbo Raya, organisasi pelaksana yang berperan utama yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

Berdasarkan proses pelaksanaannya, masyarakat yang ikut serta dalam program BSPS dikarenakan sebelumnya telah memperoleh informasi dari pihak Kecamatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo. Program ini awalnya ditawarkan kepada Kecamatan apakah akan menerima program ini atau tidak. Tawaran tersebut tentu saja disambut baik oleh pihak Kecamatan dan Desa karena program ini akan membantu masyarakat. Selanjutnya akan dilaksanakan seleksi langsung oleh Dinas untuk menentukan penerima yang benar-benar layak dan memenuhi syarat penerima manfaat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada indikator organisasi dalam Implementasi Penanganan Permukiman Kumuh dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik berdasarkan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2).

Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi menurut Jones (1996: 296), yaitu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir tersebut harus diwujudkan dan direalisasikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut yakni supaya terbangunnya hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa sasaran utama dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Program BSPS di Kecamatan Dumbo Raya masyarakatnya menyambut baik atas hadirnya program tersebut dikarenakan dapat membantu memperbaiki rumah-rumah penerima. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pada indikator interpretasi dalam Implementasi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo telah berjalan dengan baik berdasarkan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2).

Penerapan (*Application*)

Penerapan menurut Jones (1996: 296), yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin dari suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Pedoman yang dipergunakan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Gorontalo khususnya Kecamatan Dumbo Raya yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerapan program BSPS di Kecamatan Dumbo Raya yang dimulai dari tahap perencanaan hingga akhir semua didasarkan pada pedoman tersebut, dikarenakan jika ada penyelenggaraan yang tidak sesuai prosedur maka akan menjadi hambatan dalam proses penerapan program tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pada indikator penerapan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan Page. 397

yang dipergunakan yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2). Penyelenggaraan program tersebut berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.

SIMPULAN

Proses Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik. Pada indikator pelaksanaan berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya. Pada indikator pelaporan berdasarkan temuan di lapangan KPB kesulitan dalam melakukan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sehingga yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL.

Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan menggunakan indikator organisasi (organization), interpretasi (interpretation), dan penerapan (application) sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini yaitu: Terkait pendataan perlu untuk dioptimalkan kembali, sehingga diharapkan tujuan dari implementasi kebijakan dapat tepat sasaran. Terkait penyediaan bahan bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) perlu meningkatkan pendampingan terhadap Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sehingga dalam proses penyediaan bahan bangunan hingga penggunaan untuk pembangunan benar-benar terjamin dan tepat sasaran. Terkait pelaporan, TFL perlu meningkatkan proses bimbingan teknis dalam hal penyusunan laporan LPD agar masyarakat tidak hanya mengetahui proses awal perencanaan tetapi hingga akhir pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. 1(1), 54, <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Ariyanti, Annisa, Revitalisasi Permukiman Kumuh di Desa Purwogondo Sebagai

- Kampung Wisata Minat Khusus Home Industry Tahu, September 2022.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fahmi, Irham. 2018. *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, Bandung: Alfabeta.
- Handayaningrat, Soewarno. 2017. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- JDIH BPK RI. (2017). *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>
- JDIH. (2018, March 19). *Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2018*. Retrieved from <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2286/1>
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company, California.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban, Y. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Liputo, Sri Intan. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo*.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2019. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2017. *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Winarno, Budi. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses Edisi Revisi*. Jakarta: Media Pressindo.